BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu untuk menjadi rujukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Herman Darwis (2009)

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dimana implementasi *corporate governance*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, serta komisaris independen terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2006-2008. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan teknik analisis yang digunakan ialah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi GCG berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang dapat meningkat. Hal ini membuktikan jika pengelolaan perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2006-2008 telah menerapkan *corporate governance* dengan baik yang diukur dengan *corporate governance* indeks perception. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah keterkaitan penerapan prinsip *corporate governance* terhadap variabel dependennya. Dimana variabel dependen yang digunakan yaitu kinerja perusahaan.

Namun, penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu terletak pada variabel independen yang digunakan. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti ini ialah *corporate governance*, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan koneksi politik. Sampel yang digunakan pada penelitian ini perusahaan yang terdaftar di BEI, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan Perbankan di Indonesia.

Tidak hanya itu saja, perbedaan lainnya yaitu terletak pada periode penelitian. Dimana pada penelitian ini periode yang digunakan pada tahun 2006-2008, sedangkan periode penelitian yang akan dilakukan pada tahun 2014-2017. Selain itu, penerapan prinsip *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian sebelumnya terdapat komisaris independen sebagai salah satu tolak ukurnya. Dimana komisaris independen dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel moderasi.

2. Tri Wulandari, Raharja (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *political connection* dan struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu ukuran perusahaan dan *leverage*, sedangkan untuk variabel dependen pada penelitian ini ialah kinerja dari perusahaan. Variabel independen yang digunakan ialah *political connection*, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan 57 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009, 2010, dan 2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan jika kinerja perusahaan yang terhubung dengan koneksi politik tergolong lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Selain itu, kepemilikan institusional dan kepemilikan saham juga tidak berpengaruh terhadap kinerja suatu perusahaan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada variabel dependennya. Dimana variabel dependen yang digunakan ialah mengukur kinerja. Pengukuran yang digunakan oleh kedua penelitian ini yaitu rasio profitabilitas dengan indikator *Return on Asset* (ROA).

Disamping itu, penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu pada penggunanaan variabel independennya. Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu *political connection* dan struktur kepemilikan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis hanya menggunakan satu variabel independen yaitu koneksi politik saja. Sampel pada penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan Perbankan di Indonesia. Periode penelitian pun juga memiliki perbedaan, penelitian ini dilakukan pada tahun 2009, 2010, dan 2011. Berbeda dengan periode penelitian yang akan dilakukan yaitu pada tahun 2014-2017. Dimana pada periode tersebut difokuskan pada era pemerintahan presiden Joko Widodo.

Pembahasan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan juga memiliki perbedaan. Dimana pada penelitian yang akan dilakukan akan membahas peran komisaris independen apakah dapat mempengaruhi *political connection* pada kinerja perusahaan atau tidak. Sehingga keberadaan komisaris independen tersebut

dijadikan sebagai variabel moderasi, sedangkan penelitian ini hanya terfokuskan pada kepemilikan konstitusional dan kepemilikan publik saja pada kinerja perusahaan.

3. Anis Maaloul, Raida Chakroun, dan Sabrine Yahyaoui (2016)

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh koneksi politik terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Tunisia (TSE) pada periode 2012-2014. Data diperoleh dari laporan keuangan dan hubungan politik perusahaan beserta para dewan komisaris secara manual. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi multivariat. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya investor yang menanamkan modalnya pada perusahaan yang terkoneksi politik sehingga dapat memberikan berbagai manfaat bagi investor sendiri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel independen yaitu koneksi politik. Dimana koneksi politik sendiri dapat dilihat dari direksi, dewan komisaris, maupun para pemegang saham (*top officers)* perusahaan yang memiliki hubungan dengan politik. Sehingga hal ini dipercaya dapat mempengaruhi kinerja maupun nilai suatu perusahaan.

Disamping itu, penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan tersebut terletak pada variabel dependen yang digunakan, penelitian ini menggunakan dua variabel sekaligus, yaitu kinerja dan nilai perusahaan. Adapun pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis

hanya menggunakan satu variabel, yaitu kinerja bank. Sampel yang digunakan pun juga berbeda, penelitian ini menggunakan sampel perusahaan non-keuangan saja. Begitu sebaliknya, penelitian yang akan dilakukan menguji pada Perbankan di Indonesia. Perbedaan lainnya terletak pada periode penelitian, dimana penelitian ini dilakukan pada tahun 2012-2013. Periode pada penelitian yang akan dilakukan pada tahun 2014-2017. Penelitian ini pun juga tidak memiliki variabel moderasi, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan menggunakan komisaris independen sebagai variabel moderasi.

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
STIE
PERBANAS

Berikut merupakan tabel pemetaan hasil penelitian terdahulu dan penelitian saat ini:

Tabel 2. 1
PEMETAAN HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN PENELITIAN SAAT INI

NO.	KETERANGAN	PENELITI			
		Herman Darwis	**Tri Wulandari, Raharja**	**Anis Maalaol, Raida Chakroun, dan Sabrine Yahyaoui**	**Giovani Virza Amallia**
1.	Variabel Dependen	Kinerja Perusahaan	Kinerja Perusahaan	Kinerja dan Nilai Perusahaan	Kinerja Bank
2.	Variabel Independen	*Corporate Governance*	*Political Connection* dan Struktur Kepemilikan	*Political Connections*	Koneksi Politik
3.	Variabel Moderasi				Komisaris Independen
3.	Populasi	Perusahaan terdaftar di BEI	Perusahaan terdaftar di BEI (57 Perusahaan)	Perusahaan non keuangan terdaftar di TSE	Perbankan di Indonesia
4.	Teknik Analisis	Analisis Regresi Berganda	Analisis Regresi Berganda	Analisis Regresi Berganda	Analisis Regresi Berganda
5.	Periode	2006-2008	2009-2011	2012-2014	2014-2017
6.	Hasil Penelitian	1. Kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.	1. *Political connection* berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.	1. Koneksi Politik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja dan nilai perusahaan.	1. Koneksi Politik berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja bank
		2. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.	2. Kepemilikan institusional dan kepemilikan saham tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.	2. Perusahaan yang terkoneksi politik lebih berpengaruh terhadap kinerja dan nilai perusahaannya.	2. Komisaris independen tidak memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap kinerja bank.

Sumber : Herman Darwis (2009), Tri Wulandari, Raharja (2013), Anis Maalaol, Raida Chakroun, Sabrine Yahyaoui (2016)

2.2. Landasan Teori

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori yang dapat menunjang penjelasan dan analisis yang akan dilakukan. Adapun teori yang digunakan sebagai berikut:

2.2.1. Kinerja Bank

Kinerja merupakan istilah yang digunakan untuk kegiatan yang telah dilakukan perusahaan berupa kegiatan operasional pada periode waktu tertentu dengan memerhatikan hal-hal yang berkaitan dimasa lalu, seperti biaya yang telah diproyeksikan, dengan didasari efisiensi serta pertanggung jawaban atau akuntabilitas (Srimindarti, 2004). Pada dasarnya pengukuran kinerja perbankan tidak jauh berbeda dengan pengukuran kinerja perusahaan pada umumnya. Dimana pengukuran kinerja digunakan sebagai fondasi dan pengendalian secara efektif atas kegiatan operasional yang telah dilakukan suatu perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan pengertian dari kinerja bank merupakan hasil dari kegiatan manajemen atau suatu proses bisnis yang telah dilakukan oleh bank tersebut.

Hasil dari kegiatan ini dijadikan sebuah tolak ukur bank untuk dapat mencapai tujuan manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila perusahaan mencapai tujuan manajemennya, diantara lain adalah keuntungan. Maka perusahaan tersebut telah melakukan proses bisnis yang panjang dengan mengorbankan berbagai macam sumber daya yang dimiliki.

Salah satu cara pengungkapan bank dalam pencapaian keuntungan yang dihasilkan yaitu pada laporan keuangannya. Dimana laporan keuangan tersebut dapat mencerminkan kondisi kinerja suatu bank dengan mengevaluasi kinerja bank

di masa lalu. Apabila laporan tersebut menyajikan informasi keuangan yang baik, maka bank dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dan dapat mengolah sumber dayanya secara efisien.

Penilaian kinerja bank yang berdasarkan laporan keuangan tersebut, dapat dipertimbangkan dari analisis rasio-rasio keuangan. Adapun rasio keuangan yang umum digunakan untuk memberikan informasi mengenai kemampuan finansial perusahaan ialah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio akivitas, dan rasio profitabilitas. Masing-masing rasio keuangan tersebut, memiliki fungsi yang berbeda.

Diantaranya rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini membutuhkan informasi aset lancar, persediaan, kas maupun surat berharga jangka pendek yang dimiliki bank. Sebaliknya, rasio solvabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Dimana informasi yang dibutuhkan pada rasio ini selain total kewajiban yaitu total aset, kewajiban jangka panjang serta total modal ekuitas. Semakin besar nilai rasio ini, maka mencerminkan semakin tinggi pula risiko keuangan yang dihadapi bank.

Selanjutnya, rasio aktivitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola sumberdayanya secara efesien dan efektif. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam rasio ini, yaitu informasi persediaan, harga pokok penjualan, piutang usaha, aset tetap, penjualan bersih hingga perputaran piutang maupun persediaannya. Rasio yang terakhir ialah rasio profitabiltas yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam

menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki bank. Sumber daya tersebut, dapat berupa aset, modal ekuitas, maupun penjualan bersih bank.

Dari beberapa rasio keuangan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini terbagi menjadi dua sudut penilaian atau indikator, yaitu dari segi penjualan dan investasi. Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan ialah pengukuran kinerja dari segi investasi bank. Sehingga penelitian ini menggunakan *Return on Asset* (ROA) sebagai indikator dari kinerja bank.

Indikator *Return on Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur efisiensi bank dalam mengelola keseluruhan investasi yang dimiliki dengan tujuan menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka menunjukkan semakin efisien suatu bank dalam mengelola asetnya. Apabila aset terkelola secara efisien, dapat diyakini akan menarik minat investor dalam melakukan investasi terhadap saham perusahaan tersebut di bursa saham. Pengukuran indikator *Return on Asset* (ROA) dapat dihitung menggunakan laba bersih sebelum pajak dibagi dengan total aset yang dimiliki. Namun, pada penelitian ini menggunakan informasi *Return on Asset* (ROA) suatu bank yang dapat di akses melalui laporan tahunan.

2.2.2. Koneksi Politik

Sebuah perusahaan di industri perbankan diindikasikan dapat dengan mudah memperoleh sumber pendanaan apabila bank tersebut terkoneksi dengan politik. Koneksi politik sendiri dapat dipandang sebagai situasi dimana individu atau kelompok dari direksi, anggota dewan komisaris, komisaris independen, para pemegang saham, maupun kerabat adalah pemegang jabatan politik atau dapat

dikatakan sebagai politikus (Faccio, *et. Al.*, 2006). Bank yang terkoneksi politik ini biasanya disebut dengan *risk taker*. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut menggunakan kekuasannya dalam beberapa pegambilan keputusan yang menguntungkan bagi bank.

Menurut Wijantini (2007) salah satu penggunaan kekuasaan pada perusahaan yang terkoneksi politik ialah kemudahan memperoleh pengadaan sumber daya. Diantaranya peminjaman dana untuk kegiatan operasional dari pihak lain. Selain itu, perusahaan terkoneksi politik dapat memperoleh suatu kebijakan, pengalokasian sumber daya hingga persetujuan kegiatan yang dapat dengan mudah dilaksanakan (Maaloul, *et. Al.*, 2016). Bank yang terkoneksi politik memiliki probabilitas yang sangat kecil untuk ditolak ketika mengajukan pengadaan sumber daya, termasuk pada saat membutuhkan peminjaman dana dari politisi. Adapun indikasi perusahaan bank yang dinyatakan memiliki koneksi politik sebagai berikut:

1. Setidaknya satu orang *top officer* perusahaan memangku jabatan politik sebagai anggota MPR periode 2014-2017.
2. Setidaknya satu orang *top officer* perusahaan memangku jabatan politik sebagai anggota kabinet menteri pemerintahan presiden Joko Widodo.
3. Para pemegang saham ≥ 5% memangku jabatan sebagai anggota MPR/menteri.
4. Bank dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Akibat kemudahan pengadaan sumber daya yang diterima oleh bank yang terkoneksi politik tersebut, risiko yang diterima pun tinggi. Perusahaan terkoneksi politik mengeluarkan biaya yang tinggi untuk pembiayaan bank akses

tersebut, sehingga hasil akhir keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan pun menurun (Wijantini, 2007).

2.2.3. Komisaris Independen

Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* bagi bank amatlah penting. Dimana *good corporate governance* merupakan suatu sistem yang dapat mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan wewenang para pihak-pihak utama dalam suatu perusahaan (Agustia, 2013). Pihak-pihak utama yang dimaksud ialah pemegang saham, dewan direksi, maupun manajemen bank itu sendiri. Apabila bank dapat menerapkan prinsip *good corporate governance* dengan baik maka akan menerima beberapa manfaat, diantaranya :

1. Kinerja bank akan meningkat melalui efisiensi suatu bank, proses pengambilan keputusan yang tepat, serta perbaikan pelayanan pada pemegang saham.
2. Kemudahan dana pembiayaan yang lebih murah.
3. Meningkatkan kepercayaan investor.
4. Kepuasan para pemegang saham sehingga dapat meningkatkan *shareholder's*.

Adapun prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dapat diterapkan bank agar tercapainya suatu tujuan perusahaan, sebagai berikut :

1. *Transparency* (Transparansi)
2. *Accountability* (Akuntabilitas)
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)
4. *Independency* (Independensi)
5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Terdapat beberapa pengambilan keputusan yang dipertimbangkan melalui pemegang saham, sehingga bank perlu memastikan pula telah melindungi kepentingan para pemegang sahamnya. Diantaranya dengan melakukan pengawasan terhadap kualitas informasi yang akan disampaikan. Dimana informasi tersebut dapat memengaruhi pengelolaan suatu bank pada proses pencapaian tujuan. Agar tercapainya prinsip *good corporate governance* pada bank dengan fungsi pengawasan tersebut, maka bank perlu adanya peran dewan komisaris. Dewan komisaris sendiri berperan sebagai pengawas mekanisme pengambilan keputusan dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan semata-mata demi kepentingan bank. Agar fungsi ini dapat berjalan dengan efektif, maka diperlukan pengangkatan anggota dewan dari luar perusahaan yang disebut sebagai komisaris independen.

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lain, dan bebas dari hubungan bisnis yang memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen memegang peran penting bagi suatu bank. Hal ini dikarenakan banyaknya transaksi pada proses bisnis di suatu bank yang berbenturan dengan kepentingan para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Sehingga peran komisaris independen dapat memastikan bahwa bank telah menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik melalui pemberdayaan dewan komisaris.

Keberadaan komisaris independen dalam suatu bank juga telah diatur melalui peraturan Bursa Efek Jakarta. Peraturan ini menerangkan bahwa bank yang telah tercatat di bursa harus memiliki komisaris independen secara profesional yang memiliki jumlah saham sama dengan para pemegang saham minoritas. Selain itu, komisaris independen dalam suatu perusahaan minimal berjumlah 50% dari jumlah anggota dewan komisaris. Pemilihan komisaris independen sendiri didasari oleh pendapat para pemegang saham minoritas yang disalurkan melalui komite nominasi dan remunerasi. Berikut merupakan kriteria pemilihan komisaris independen :

1. Tidak terafiliasi dengan para pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham pengendali.
2. Tidak terafiliasi dengan direksi dan atau dewan komisaris lainnya.
3. Tidak memiliki jabatan rangkap dengan perusahaan yang terafiliasi.
4. Mengerti perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.
5. Direkomendasikan oleh para pemegang saham minoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

$$\textbf{K. IND} = \frac{\textbf{Jumlah Komisaris Independen}}{\textbf{Jumlah Komisaris}} \textbf{x 100\%} \qquad \text{.....(1)}$$

2.2.4. Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Kinerja Bank

Perusahaan yang terkoneksi politik pada umumnya dapat menerima beberapa keuntungan diantaranya adalah kekuatan pasar, sumber pendanaan, hingga menjalin kontrak berupa proyek dengan pemerintah (Wijantini, 2007). Namun, apabila perusahaan pada industri perbankan dengan mudah memperoleh

pinjaman dana, maka dapat dengan mudah juga meningkatkan hutang bagi bank. Sehingga hal ini juga dapat menjadi beban bank yang mempengaruhi kinerja suatu bank yang kian memburuk.

Ketika bank memiliki hutang berlebih maka dapat mempengaruhi kemakmuran para pemegang sahamnya. Hal seperti ini sangatlah mungkin terjadi apabila bank yang memiliki hutang dengan jumlah yang tinggi dan mengakibatkan pembayaran beban bunga yang tinggi pula. Jika hal tersebut terjadi, maka dapat mengurangi keuntungan yang didapatkan bank. Dengan demikian, pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan (Tri Wulandari, 2013).

Sebaliknya, Wijantini (2007) menyatakan bahwa perusahaan terkoneksi politik memiliki hubungan positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, Su dan Fung (2013) juga menyatakan jika koneksi politik dapat memberikan pengaruh positif bagi suatu kinerja perusahaan, khususnya dari segi pendanaan. Hal ini dapat terjadi jika suatu perusahaan khususnya berada di industri perbankan dan yang memiliki koneksi politik sedang membutuhkan dana untuk kegiatan operasionalnya.

Dengan demikian, mudahnya akses peminjaman dana serta pengadaan sumber daya dapat menarik minat investor untuk berinvestasi pada bank tersebut. Hal tersebut akan meberikan keunggulan tersendiri bagi perusahaan terkoneksi politik yang berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja perusahaan (Maaloul, *et. Al.*, 2016).

2.2.5. Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Kinerja Bank dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi

Maraknya bank yang diperbincangkan akibat sumber daya yang diperoleh amatlah mudah menarik perhatian para investor. Investor cenderung tertarik karena adanya sumber daya yang dirasa dapat memberikan berbagai manfaat. Diantaranya akses hutang, kebijakan baru, hingga pembangunan proyek yang dapat dengan mudah diperoleh. Bank seperti ini diindikasi memiliki hubungan koneksi politik. Dampak yang diperoleh dari bank yang terkoneksi politik tersebut, dapat melakukan perluasan aset sehingga kinerja bank pun mengalami peningkatan.

Kinerja bank mengalami peningkatan jika perusahaan diindikasikan terkoneksi politik. Sehingga dapat dikatakan bank telah mencapai tujuannya, dengan penilaian indikator *Return on Asset* (ROA). Namun pernyataan ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Wulandari (2013) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap kinerja bank. Kemudahan akses yang diperoleh bank terkoneksi politik tersebut dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Sumber daya yang dengan mudah diperoleh pun perlu pengembalian dengan jumlah yang tidak sedikit. Hal tersebut dikhawatirkan dapat memberikan risiko yang tinggi bagi bank itu sendiri.

Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, maka diperlukan suatu peran yang bertindak mengawasi kegiatan bank. Tak terkecuali dalam pengambilan keputusan hingga penyampaian kualitas informasi pada para pemegang saham. Peran tersebut dapat terlaksana melalui adanya komisaris independen, yang diharapkan dapat mengawasi secara lebih independen dan bertindak semata-mata demi kepentingan bank. Sehingga pada penelitian ini, komisaris independen

dijadikan variabel moderasi terhadap pengaruh koneksi politik. Hal ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat bank memiliki koneksi politik yang mempengaruhi kinerja banknya.

2.3. Kerangka Pemikiran

Berikut merupakan kerangka pemikiran dari kolaborasi penelitian ini :

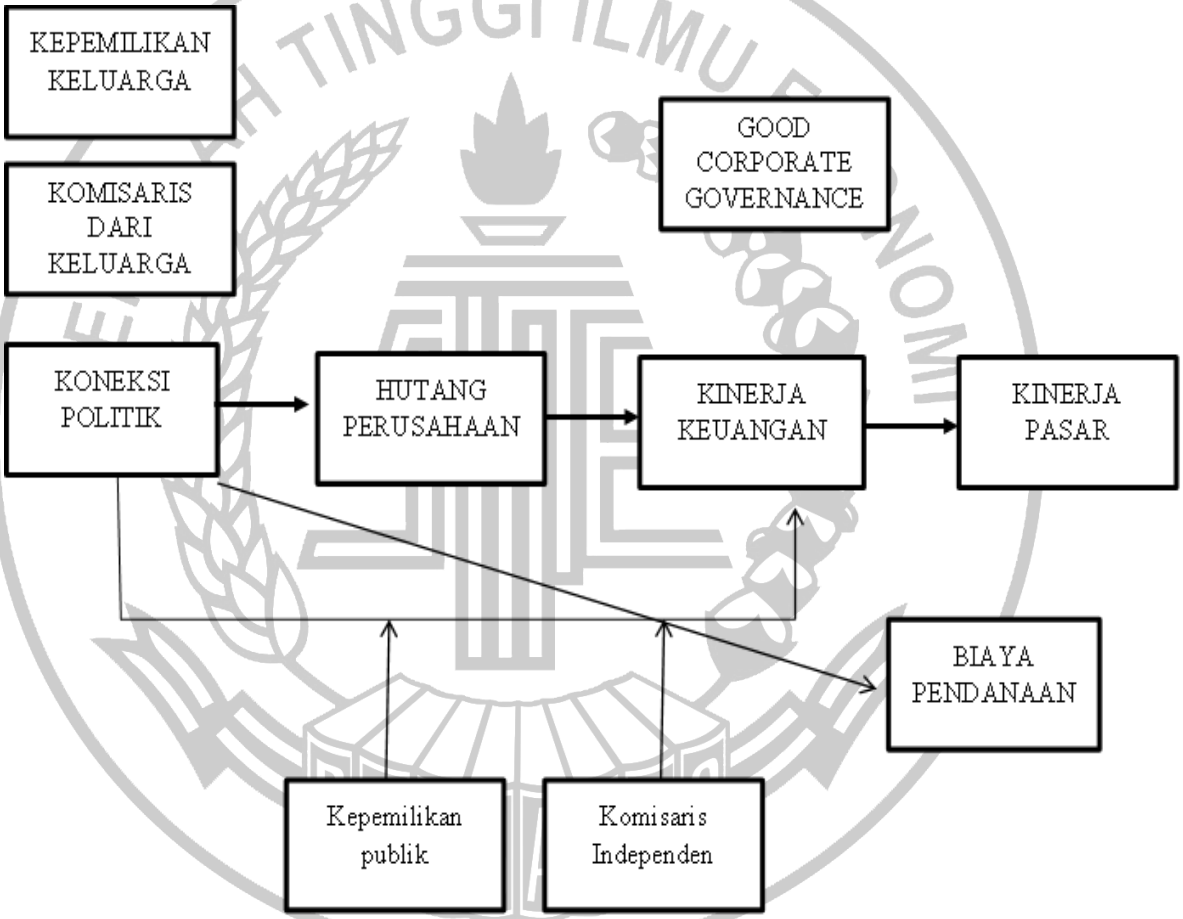

Sumber : data diolah

Gambar 2. 1
KERANGKA PEMIKIRAN KOLABORASI

Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagai berikut :

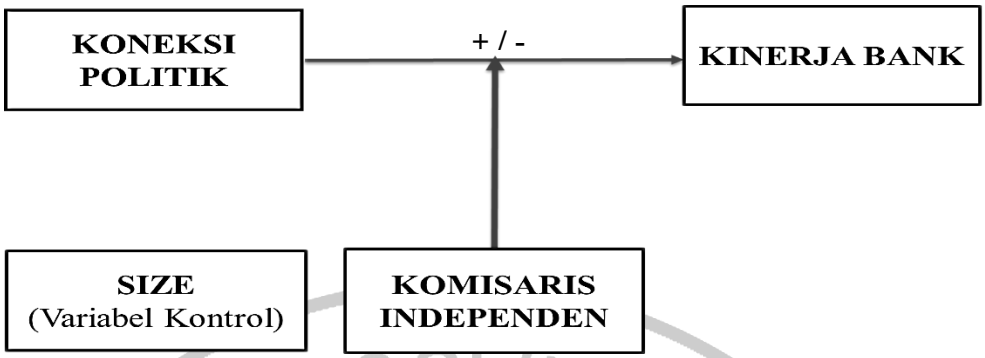

Sumber: data diolah

Gambar 2. 2
KERANGKA PEMIKIRAN

2.4. Hipotesis Penelitian

Dari hasil kerangka pemikiran diatas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_1 : Koneksi politik berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja bank.

H_2 : Komisaris independen dapat memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap kinerja bank.